

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Majelis Hakim dan penegak hukum lainnya di persidangan dalam Penerapan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Terdakwa tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang diikuti dengan perkosaan terhadap jenazah Korban. Tujuannya adalah untuk tercapainya nya keadilan yang di cita-citakan seluruh masyarakat, mengetahui apakah penerapan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Terdakwa pembunuhan dan diikuti persetubuhan terhadap jenazah Korban nya sudah sesuai dengan unsur keadilan, dan juga untuk mengetahui cara penegak hukum dalam mengatasi perbuatan atau tindakan seperti hal tersebut, serta mengetahui alasan dasar hakim dalam menerapkan Pasal tersebut terhadap Terdakwa tindak pidana pembunuhan yang kemudian melakukan persetubuhan terhadap jenazah Korban. Oleh karena itu perlu adanya analisis terhadap putusan yang dibuat dalam menerapkan Pasal yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, diharapkan analisis ini memberikan pemahaman tentang betapa pentingnya kita untuk mengetahui alasan dasar para penegak hukum dalam menerapkan Pasal yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk terciptanya keadilan hukum bagi pelaku perbuatan pidana tersebut.

Kata kunci: Pasal 338 KUHP, terdakwa, korban.

ABSTRACT

This study aims to examine the judicial and prosecutorial application of Article 338 of the Indonesian Penal Code (KUHP) in cases involving the unlawful taking of a person's life, followed by acts of sexual intercourse with the victim's corpse. The primary objective is to evaluate whether the implementation of Article 338 aligns with the principles of justice as envisioned by society. Furthermore, the research seeks to explore how legal authorities address such morally and legally complex offenses and to assess the judicial reasoning underlying the application of this article to defendants charged with both homicide and post-mortem sexual acts.

A critical analysis of relevant court decisions is necessary to determine whether the legal provisions applied accurately correspond to the elements of the crime committed. This analysis is intended to contribute to a deeper understanding of the rationale employed by legal practitioners in selecting appropriate legal provisions, and to emphasize the importance of aligning legal interpretation with the pursuit of substantive justice in criminal proceedings.

Keywords: Article 338 Indonesian Penal Code, accused, victim